

SUMBER

Kompas

HARI/TGL:

Senin 19/7/2004

HLM./KOL:

IV/3-6

KODE:

SUBJEK

HAM, Demokrasi, dan Negara

OLEH HENDARDI

TANGGAL 5 Juli lalu adalah kali pertama warga negara Indonesia mengikuti pemilihan umum langsung presiden dan wakil presiden. Banyak warga berharap agar pasangan yang dipilih kelak menguasai pemerintahan. Dalam urusan dengan pemilu ini, tidak sedikit orang yang harus "berkorban", baik sebagai massa pendukung maupun juru kampanye.

Namun, penting pula kita mengambil jarak atas seluruh rangkaian pemilihan umum (pemilu) legislatif dan eksekutif untuk kembali mengingatkan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia (HAM) dan proses demokratisasi adalah perjuangan setiap hari, bukan sekadar dalam putaran lima tahun sekali.

Sungguh menyedihkan jika diterima pandangan tentang pilihan politik "yang terbaik dari terburuk" dalam pemilu presiden. Seolah tak ada pilihan lain yang kelak memerintah bisa berbuat lebih baik. Padahal pandangan ini hanya berkiblat pada negara (*state*), bukan pada "masyarakat warga" (*civil society*).

Perjuangan HAM

HAM tak hanya hak-hak sipil dan politik, tetapi juga hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Apalagi direduksi sekadar hak atas kebebasan berserikat (berpartai) dan hak pilih dalam pemilu. Pemilu hanya satu sarana bagi warga negara (*citizen*) untuk menggunakan hak pilihnya dan hanya berlaku lima tahun sekali.

Menaruh harapan berlebihan pada pemilu akan menggiring kita seolah ia bakal mengembalikan kebijakan, perilaku kekuasaan negara, dan hukum untuk perlindungan dan pemenuhan hak mayoritas warga. Kenyataannya, perlindungan dan pemenuhan hak setiap orang adalah masalah yang berlangsung tiap hari.

Pelanggaran (*violation*) atau pengingkaran (*denial*) HAM terjadi tiap hari. Banyak orang semena-mena ditangkap dan ditahan serta mengalami penyiksaan (*torture*) di tahanan. Juga pembunuhan di luar proses hukum (*extrajudicial killing*). Persoalan yang terus mewarnai adalah gagalnya negara menghentikan atau mengurangi banyak kasus pembebasan dari proses hukum (*impunity*).

Dalam hak-hak ekonomi dan sosial, ada puluhan juta orang tanpa pekerjaan, jutaan anak putus sekolah, ratusan ribu warga "rawan pangan" dan kehilangan rumah, serta kaum perempuan terus mengalami diskriminasi dan kekerasan. Bukankah situasi ini membangkitkan kebutuhan tiap orang yang diingkari hak-haknya untuk berjuang bagi pemenuhan hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, hak atas pangan dan perumahan, serta hak-hak perempuan untuk bebas dari diskriminasi dan kekerasan?

Berpegang pada hukum HAM internasional (*international human rights law*), para pemegang kekuasaan negara bukan saja harus melaksanakan kewajibannya, tetapi juga bertanggung jawab atas pelanggaran atau pengingkaran HAM. Dalam hubungan ini, tiap orang akan saling berhadapan (*vis-à-vis*) dengan kekuasaan negara (*state power*).

Perjuangan demokrasi

Sebagaimana HAM, demokrasi juga persoalan sehari-hari dan bagian dari perjuangan HAM. Contoh, bagaimana sejumlah warga membangun komunitasnya, kaum buruh mengorganisasikan diri

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAM RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
JL. MAYOR JENDERAL SUTOYO-CILILITAN
JAKARTA TIMUR

SUMBER :

HARI/TGL:

HLM./KOL:

KODE:

SUBJEK

ke dalam serikat buruh, aktivis politik merebut kebebasan menganut ideologi, kebijakan pemerintah dan UU yang mengafirmasi yang lemah, serta solidaritas atas mereka yang tertindas.

Intinya, demokrasi berlandaskan kekuatan rakyat yang lazim disebut "masyarakat warga". Upaya ini niscaya gagal jika lebih mengandalkan sikap dan tindak-tanduk oportunisme dan pragmatisme politik karena hanya akan menyempitkan ruang politik yang pada dasarnya masih banyak yang terbuka.

Perlu dicamkan, "masyarakat warga" adalah tempat berdiri dan beroperasinya kekuasaan negara. Soalnya, "masyarakat warga" masih lemah sehingga belum memenuhi kepentingan *vis-à-vis* terhadap negara. Bukankah tugas yang mestinya dikerjakan para pembela HAM (*human rights defenders*) dan demokrat adalah memberdayakan masyarakat ketimbang bermimpi ihwal "penguasa murah hati"?

Masalah pokok yang dihadapi "masyarakat warga" adalah belum terwujudnya komunitas HAM dan demokrat yang kuat. Bukankah selama ini kita terperangkap untuk mengandalkan strategi program yang berorientasi pada negara (*state oriented strategy program*) ketimbang berorientasi pada masyarakat (*society oriented strategy program*)?

Kelemahan pokok yang diderita adalah tak adanya keteguhan dan kegigihan dalam merangkul dan memberdayakan secara strategis atas para korban pelanggaran atau pengingkaran HAM. Korban dan keluarga mereka sering hanya di atasnamakan belaka. Amat langka mereka difasilitasi melalui pendidikan dan partisipasi demokratis agar berkembang suatu komunitas yang berdaya dan mampu mengatur diri (*self-regulation*).

Penyalahgunaan kekuasaan

Benar, secara normatif, negara bertujuan memajukan kesejahteraan umum

dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan. Namun, benar pula, operasi kekuasaan negara, baik di tangan pemerintah atau militer maupun di tangan parlemen dan aparat kehakiman, cenderung menyeleweng dari tujuan normatifnya. Dan, penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) adalah kenyataan umum di masyarakat.

Pandangan yang lebih kritis mengemukakan, negara hanya fasilitator bagi kepentingan segelintir orang yang menguasai sumber-sumber ekonomi, baik asing maupun domestik, sesuai dengan konjungtur perekonomiannya. Kenyataan ini pula yang menyebabkan nyaris mustahilnya suatu demokrasi ekonomi tanpa perubahan mendasar.

Selama Negara Orde Baru (NOB) beroperasi, bukan saja kekayaan alam dikuras dan sebagian besar hasilnya dinikmati segelintir orang di sekitar istana dan pihak asing. Pada 1980-an, perolehan devisa dari industri manufaktur ringan justru bersumber dari upah buruh yang rendah dan jam kerja yang panjang. Secara politik, NOB hanya negara otoriter.

Kini, hasil pemilu tak boleh diabaikan sebagai bagian pembentukan kembali aparat negara setelah berakhirnya rezim Soeharto, Habibie, dan Abdurrahman Wahid, serta berkurangnya kekuasaan militer. Namun, hakikatnya sama, hanya elite politiknya berganti dengan menerima warisan birokrasi yang korup dan membuat mereka terperosok di situ.

Negara—dengan wataknya yang begitu—menjadi tantangan serius bagi mereka yang masih mempertahankan integritas politiknya pada perlindungan dan pemenuhan HAM dan demokrasi, di mana penekanannya adalah memastikan secara bertahap pembentukan "masyarakat warga", bukan menggadaikannya akibat tergiur oportunisme dan pragmatisme politik.

HENDARDI

Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI)